

STRATEGI PENANGANAN KEKUMUHAN DI PERMUKIMAN PESISIR KAMPUNG TUA TANJUNG PIAYU LAUT

Carissa Dinar Aguspriyanti

Dosen Program Sarjana Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Internasional Batam
e-mail: carissa@uib.ac.id

Celine Verliem

Mahasiswa Program Sarjana Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Internasional Batam
e-mail: 2012022.celine@uib.edu

Megat Julaidi

Mahasiswa Program Sarjana Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Internasional Batam
e-mail: 2112038.megat@uib.edu

ABSTRAK

Persoalan permukiman kumuh telah menjadi isu lama perkotaan di negara berkembang. Kekumuhan ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi, minimnya sarana dan prasarana yang memadai, hingga perilaku tidak sehat penduduknya. Jika dibiarkan, maka persoalan kekumuhan dapat berujung pada ketidaklayakan huni suatu permukiman. Oleh karena itu, studi ini mengevaluasi karakter kekumuhan di salah satu permukiman pesisir di Kepulauan Riau yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan sejarah, yaitu Kampung Tua Tanjung Piayu Laut, dan menyusun strategi penanganannya melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil observasi, persoalan kekumuhan di sana mencakup kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, dan ruang terbuka publik. Sebagai upaya penanganan, strategi yang dirumuskan meliputi pembangunan fisik yang mampu memenuhi kebutuhan dasar warga dan memperkuat identitas permukiman sebagai kawasan wisata kuliner seafood, serta pemberian edukasi kepada warga. Selain meningkatkan partisipasi masyarakat setempat, kolaborasi dengan lembaga masyarakat dan pemerintah juga diperlukan untuk dapat menyusun perencanaan penanganan kekumuhan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di kawasan ini. Melalui pemberdayaan masyarakat setempat dalam merencanakan, melaksanakan, dan memelihara, perubahan yang menghormati kearifan lokal di permukiman pesisir Kampung Tua Tanjung Piayu Laut pun akan dapat diwujudkan secara nyata dan optimal.

Kata kunci : *strategi penanganan, kekumuhan, permukiman pesisir*

ABSTRACT

The problem of slum settlements has become a long-standing urban issue in developing countries. The slum is caused by various factors, ranging from economic conditions, the lack of adequate facilities and infrastructure to the unhealthy behavior of the residents. If not addressed immediately, the problem of slums can lead to the uninhabitability of a settlement. Therefore, this study evaluated the character of slums in one of the coastal settlements in the Riau Islands which has natural, cultural, and historical wealth, namely Kampung Tua Tanjung Piayu Laut, and developed strategies for dealing with it through a qualitative descriptive approach. Based on observations, the problem of slums there includes the condition of buildings, roads, clean water supply, drainage system, waste water management, waste management, fire protection, and public open space. As a response, the strategies formulated include physical development that are able to meet the basic needs of inhabitants and strengthen the identity of settlement as a seafood culinary tourism area, as well as providing education to inhabitants. In addition to increasing local community participation, collaboration with community organisations and the government is also needed to be able to develop slum management plans that are integrated with development planning in this area. Through the empowerment of local communities in planning, implementing, and maintaining, changes that respect local wisdom in the coastal settlements of Kampung Tua Tanjung Piayu Laut will be realized in a real and optimal way.

Keywords : coping strategies, slums, coastal settlements

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah lautan lebih luas daripada daratan yakni sekitar dua pertiga. Maka tidak heran jika seluruh provinsi di Indonesia memiliki wilayah pesisir dan tidak sedikit masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Fenomena permukiman pesisir ini didorong oleh kebutuhan penduduk akan kemudahan akses terhadap wilayah perairan yang notabene erat kaitannya dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu, keterbatasan lahan yang tersedia di kota mengakibatkan tingginya harga lahan sehingga memaksa masyarakat untuk bermukim di wilayah pinggiran yang salah satunya menurut Adisasmita (2015, dalam Damayanti 2018) ialah kawasan pesisir.

Salah satu permukiman pesisir di Kepulauan Riau adalah Kampung Tua Tanjung Piayu Laut yang berada di wilayah pesisir Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam. Jaraknya kira-kira 8 km dari kawasan industri Muka Kuning Batamindo. Kampung tua ini dikenal sebagai kampung yang memiliki kekayaan kearifan lokal mulai dari alam, budaya, dan sejarah, dengan hadirnya beberapa destinasi wisata yang menarik. Pada saat sebelum

kampung tua ini menjadi tempat wisata kuliner seafood untuk mendapatkan penghasilan, mata pencaharian masyarakatnya masih sangat tradisional, di mana masih mengandalkan laut sebagai mata pencaharian (Fernando & Arnesih, 2019). Kawasan permukiman ini cenderung berkembang tanpa adanya arah perencanaan yang baik sehingga beresiko menimbulkan beragam permasalahan yang dapat menurunkan kualitasnya sebagai tempat tinggal yang layak huni.

Permukiman yang tidak layak huni identik dengan permukiman kumuh di mana rata-rata memiliki ciri khas yang sama walaupun lokasinya berbeda (Joenso & Sari, 2020). Contohnya, permukiman di kawasan pesisir Tanjung Riau Kota Batam dinilai kumuh karena kondisi jalannya yang belum sepenuhnya baik, tingkat kepadatan dan ketidakteraturan bangunannya cukup tinggi, rendahnya kualitas sebagian besar bangunan, dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar yang baik (Aguspriyanti et al., 2020). Di lokasi lain, Kota Gorontalo menghadapi isu kekumuhan yang mirip dengan mayoritas permasalahan pada sistem drainasenya (Irfan et al., 2021) dan di Kota Malang – khususnya di kawasan DAS Metro – terdapat permukiman kumuh dengan karakter khas mulai dari dominasi bangunan ilegal dan berkepadatan tinggi, jalan tanah dan berlubang, nihilnya pengelolaan sampah, minimnya ruang terbuka hijau (RTH), hingga tingkat pendapatan mayoritas penduduknya yang rendah (Sakdiah & Rahmawati, 2020).

Pada dasarnya, semua orang berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang baik sebagai kebutuhan dasar manusia (Pemerintah Indonesia, 2011) dan kawasan kumuh dapat menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan dan pertumbuhan suatu kota khususnya di negara berkembang (Esariti et al., 2021). Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan permukiman yang lebih layak huni di kawasan pesisir Tanjung Piayu Laut, diperlukan adanya evaluasi terhadap karakter dan persoalan dasar kekumuhan di kampung tersebut. Kemudian melalui studi ini, dirumuskan pula strategi komprehensif sesuai standar yang diatur oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan kekumuhan dan juga kontekstual, demi terciptanya pembangunan yang tidak abai terhadap kearifan lokal suatu permukiman pesisir.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2011 pasal 1 ayat 5 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, “Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan”. Ditinjau dari segi fisik, permukiman tidak hanya

terbatas pada tempat untuk tinggal, tetapi merupakan satu struktur lengkap dengan sarana dan prasarana lingkungan pendukung (Pemerintah Indonesia, 2011). Doxiadēs (1968), mengemukakan bahwasanya permukiman adalah kawasan hunian yang diatur secara fungsional sebagai unit sosial dan ekonomi yang utuh, di mana fisiknya dilengkapi dengan prasarana lingkungan. Lima unsur utama permukiman terdiri atas alam (*nature*), manusia (*antropos*), masyarakat (*society*), ruang kehidupan (*shell*), serta jaringan (*network*) (Doxiades, 1976).

Selanjutnya, secara umum permukiman pesisir dapat diartikan sebagai lingkungan tempat tinggal pada pesisir perairan sebagai bagian dari wilayah yang tergenang maupun tidak tergenang air yang terbentuk sebagai kebutuhan dasar manusia yaitu hunian, yang didukung oleh sarana dan prasarana dasar (Lautetu et al., 2019). Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/Permen/M/2006 (Kedeputian Bidang Pengembangan Kawasan, 2006) disebutkan bahwa permukiman nelayan adalah area bermukim di wilayah khusus untuk mendukung fungsi kelautan dan perikanan. Jika ditinjau dari kelima unsur permukiman yang disampaikan oleh Doxiades (1976), permukiman pesisir memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan permukiman di wilayah lain. Karakteristik permukiman pesisir dapat dilihat dari lokasi dan bentuk pola permukiman yang berjejer mengikuti garis pantai. Hal ini mendorong terbentuknya jaringan jalan permukiman yang juga mengikuti garis pantai. Selain itu, tradisi dan budaya manusianya dalam bermasyarakat cenderung berorientasi pada laut dan perbatasan darat-air, yang notabene menjadi ruang-ruang kehidupan utamanya.

Kriteria kekumuhan suatu permukiman dan perumahan menurut Permen PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2016) dapat dilihat dari beberapa variabel sebagai berikut:

- *Bangunan gedung*; berupa keteraturan, level kepadatan, dan kualitas bangunan.
- *Jalan lingkungan*; berupa jaringan dan kualitas permukaan jalan lingkungan.
- *Penyediaan air minum*; berupa ketersediaan akses dan tingkat terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu.
- *Drainase lingkungan*; berupa kemampuan menyalurkan limpasan air hujan, ketersediaan dan kualitas konstruksi sistem drainase, hubungan dengan sistem drainase kota, serta sistem pemeliharaan.
- *Pengelolaan air limbah*; berupa ketersediaan dan kondisi sistem pengelolaan air limbah yang sesuai standar teknis yang berlaku.
- *Pengelolaan persampahan*; berupa ketersediaan dan kondisi sistem pengelolaan persampahan yang terpelihara.

- *Proteksi kebakaran*; berupa ketersediaan dan kondisi prasarana dan sarana proteksi kebakaran.

3. METODE PENELITIAN

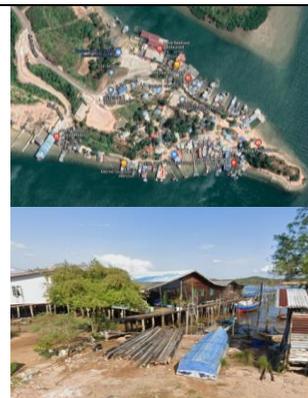
Studi ini menerapkan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan diawali dengan mengumpulkan teori-teori dari berbagai literatur, melalui buku-buku, jurnal, makalah, dan informasi di internet, kemudian dilanjutkan dengan melakukan survey lapangan, yaitu metode observasi langsung ke lokasi studi yang berada di Kampung Tua Tanjung Piayu Laut, Kota Batam, Kepulauan Riau. Data-data tersebut akan membentuk gambaran umum atau kondisi eksisting daerah studi yang kemudian dianalisis sesuai dengan variabel kriteria kekumuhan permukiman dan perumahan berdasarkan Permen PUPR No 2/PRT/M/2016, agar dapat menjelaskan fakta di lapangan secara terstruktur. Variabel fisik lain yang ditemukan dalam survey juga dianalisis, beserta aspek non-fisik seperti kondisi sosial-budaya dan ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam proses perumusan strategi penanganannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, analisis karakteristik dan persoalan dasar kekumuhan di permukiman pesisir Kampung Tua Tanjung Piayu Laut dapat dilihat pada Tabel 1. Kemudian ulasan terkait strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menangani persoalan kekumuhan tersebut sesuai dengan konteks lokal dan standar yang berlaku dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1.
Karakteristik Kekumuhan Kampung Tua Tanjung Piayu Laut

No	Kriteria	Deskripsi
Aspek Fisik		
1	Bangunan gedung	<ul style="list-style-type: none">▪ Tata massa bangunan pada kawasan pesisir Tanjung Piayu Laut mengikuti pola pantai yang telah ada namun belum memiliki keteraturan.▪ Jarak antar bangunannya cukup rapat di beberapa titik lokasi sehingga menimbulkan kepadatan.▪ Kualitas mayoritas bangunan belum cukup baik dengan kondisinya yang sebagian dibangun di atas air dan masih menggunakan material berkualitas relatif rendah seperti seng dan kayu.



2	<p>Jalan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat hierarki jalan yang jelas dan belum semua lingkungan permukiman terlayani oleh jaringan jalan lingkungan yang ada. Kualitas permukaan dari jalan selebar 1 m dan 3 m masih belum teraspal. Jalan aspal utama tidak dilanjutkan atau berhenti pada gerbang utama kampung saja. Walaupun setidaknya sebagian sudah bermaterialkan beton, belum semua jalan memiliki kondisi yang memadai. 	
3	<p>Penyediaan air minum</p> <ul style="list-style-type: none"> Air bersih sulit didapatkan pada rumah-rumah tepi laut karena tidak adanya saluran air yang memadai, hanya beberapa rumah di daratan yang dapat menggunakan air bersih yang layak. 	
4	<p>Drainase lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> Walaupun tidak terdapat sistem drainase air khusus, air limpasan hujan masih dapat mengalir dengan cukup baik ke laut. Namun ketika curah air sangat tinggi, masih ada area yang terdampak genangan atau banjir. 	
5	<p>Pengelolaan air limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> Air limbah masih dialirkan langsung ke laut. Namun beberapa rumah juga telah memiliki <i>septic tank</i>. Pembuangan secara langsung ke air laut ini dapat mencemari ekosistem laut dan dapat membahayakan masyarakat yang bermukim di perbatasan. 	
6	<p>Pengelolaan persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Hanya beberapa rumah warga yang memiliki sarana persampahan seperti bak sampah, sebagian besar membuang sampah di tepian pantai sehingga menyebabkan daerah bibir pantai kotor. Belum terdapat sistem pengelolaan sampah. 	
7	<p>Proteksi kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebakaran sangat jarang terjadi di permukiman pesisir ini, kebakaran biasanya terjadi pada hutan sekitar akibat kekeringan. Namun sebagian besar prasarana proteksi kebakaran tidak dapat ditemukan pada daerah ini sehingga beresiko membahayakan masyarakat jikalau rumah warga ada yang terbakar. 	

		Penduduk hanya dapat mengandalkan pasokan air dari laut dan ruang terbuka seadanya untuk evakuasi sementara.	
8	Ruang terbuka publik	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas ruang terbuka publik yang hanya berupa lapangan olahraga di permukiman pesisir ini dinilai kurang dapat mendukung berbagai macam aktivitas komunal bagi warga setempat. 	
Aspek Non-Fisik			
1	Sosial-budaya	<ul style="list-style-type: none"> Permukiman pesisir ini dihuni oleh suku asli dan suku pendatang seperti Bugis, Batak, Flores, dan Tionghoa sehingga tidak memiliki ritual adat tertentu. Di samping karena kondisi ekonomi, sebagian masyarakat belum memahami sepenuhnya standar bangunan hunian yang sehat sehingga kondisi rumah pun kurang memadai. Sebagian masyarakat masih berperilaku kurang menghargai lingkungan dengan membuang sampah tidak pada tempatnya dan membuang limbah langsung ke laut. 	
2	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Karena perkembangan zaman, profesi warga setempat menjadi variatif. Tidak hanya nelayan, kini sebagian besar menjadi pengusaha resto, pedagang, karyawan, dan buruh. Warga yang masih berprofesi sebagai nelayan bergantung kepada keberadaan resto <i>seafood</i> yang ada di sana untuk menjual hasil tangkapannya. Ada juga yang bekerja sebagai karyawan resto. Sedangkan resto tersebut sendiri sangat bergantung pada kehadiran wisatawan. Adakalanya hanya sedikit wisatawan yang berkunjung sehingga pendapatan warga setempat juga menurun. 	

Sumber: Penulis

Tabel 2.
Strategi Penanganan Kekumuhan Kampung Tua Tanjung Piayu Laut

No	Kriteria	Deskripsi
1	Bangunan gedung	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan edukasi kepada penduduk terkait kriteria yang perlu diperhatikan dalam membangun hunian yang layak melalui penyuluhan berkala. Menata ulang tata bangunan ini dengan konsep linier mengikuti pola garis pantai di mana jalan menjadi unsur pengorganisir utama dan konsep grid sehingga bangunan berdiri sejajar dengan jarak yang sama. Meningkatkan kualitas bangunan hunian dan bangunan publik untuk memperkuat identitas permukiman sebagai kawasan wisata kuliner <i>seafood</i>.
2	Jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Membuat sistem sirkulasi lingkungan yang terdiri dari jalan primer yaitu jalan yang terdapat pada jalur utama kampung dan jalan sekunder sebagai penghubung untuk akses ke seluruh wilayah permukiman. Memperbaiki jalan yang belum memadai dengan perkerasan beton.
3	Penyediaan	<ul style="list-style-type: none"> Membuat titik – titik penampungan air hujan dan membangun

	air minum	<p>bak-bak air yang dapat mengolahnya menjadi air bersih sebagai fasilitas komunal penyedia air bersih yang dapat digunakan semua warga.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan saluran untuk distribusi air bersih ke setiap rumah dan sarana prasarana publik.
4	Drainase lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Membuat sistem drainase yang sesuai dengan standar yang berlaku, terdiri dari drainase terbuka dan tertutup. Drainase terbuka pada daerah yang rawan banjir agar dapat dikontrol dan drainase tertutup untuk beberapa daerah pendukung. Saluran ini harus dialirkan tanpa melewati pantai dan dihubungkan ke saluran drainase pusat.
5	Pengelolaan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan edukasi kepada penduduk terkait perilaku hidup sehat dalam mengelola limbah dengan baik melalui penyuluhan berkala. Membangun SPAL-T atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat pada tiap blok sehingga air limbah dapat terfilter dengan baik secara kolektif dan menyediakan saluran sambungan di setiap rumah. Membangun <i>septic tank</i> di setiap rumah, namun jika tidak memungkinkan maka dapat dibuat <i>septic tank</i> komunal yang dapat diakses bersama sehingga semua keluarga akan mendapatkan sistem pembuangan air limbah yang layak.
6	Pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan tempat sampah di setiap rumah dan membuat tempat pembuangan sampah sementara di beberapa blok dan membuat pembuangan sampah utama sebagai tempat akhir sebelum diangkut ke pusat. Membuat sistem pengelolaan sampah terpadu dengan basis prinsip 3R (<i>reuse, reduce, recycle</i>) dan mengedukasi penduduk terkait sistem tersebut.
7	Proteksi kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan edukasi kepada penduduk terkait pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran melalui penyuluhan berkala. Membuat <i>hydrant box</i> di beberapa titik yang terhubung langsung dengan saluran air utama pada kawasan tersebut.
8	Ruang terbuka publik	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas ruang terbuka publik yang ada untuk lebih mendukung berbagai macam aktivitas warga setempat seperti area bermain, area duduk santai, area menjemur ikan, dan sebagainya. Menambah ruang terbuka publik yang mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke permukiman pesisir ini sebagai kawasan wisata kuliner <i>seafood</i>.

Sumber: Penulis

5. KESIMPULAN

Setelah melakukan evaluasi, studi ini menemukan bahwa kawasan permukiman pesisir Kampung Tua Tanjung Piayu Laut belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai permukiman yang layak, apabila merujuk pada Permen PUPR No.2/PRT/M/2016. Persoalan kekumuhan di sana mencakup kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Selain itu, ditemukan pula bahwa ketersediaan

ruang terbuka publik di kawasan tersebut dinilai kurang memadai dan perilaku warga setempat juga kurang mencerminkan adanya kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Keberadaan wisata kuliner *seafood* di Kampung Tua Tanjung Piayu Laut dinilai cukup signifikan. Jika wisata tersebut sepi, maka dapat beresiko menurunkan pendapatan warga setempat. Kondisi ekonomi inilah yang menjadi salah satu faktor dari kekumuhan di permukiman pesisir ini. Oleh karena itu, untuk menangani persoalan-persoalan tersebut, dirumuskan strategi komprehensif dan kontekstual yang sesuai dengan standar yang berlaku. Strategi tersebut meliputi pembangunan fisik yang mampu memenuhi kebutuhan dasar warga dan memperkuat identitas permukiman sebagai kawasan wisata kuliner *seafood*, serta pemberian edukasi kepada warga karena keterlibatan mereka sangatlah penting untuk mewujudkan Kampung Tua Tanjung Piayu Laut yang bebas kumuh.

Selain meningkatkan partisipasi masyarakat setempat, perlu adanya kolaborasi dengan lembaga masyarakat dan pemerintah untuk dapat menyusun perencanaan penanganan kekumuhan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di kawasan ini. Melalui pemberdayaan masyarakat setempat dalam merencanakan, melaksanakan, dan memelihara, perubahan yang menghormati kearifan lokal di permukiman pesisir Kampung Tua Tanjung Piayu Laut pun akan dapat diwujudkan secara nyata dan optimal. Namun karena keterbatasan studi, tinjauan lebih dalam terkait tingkat kekumuhan masih diperlukan untuk dapat menentukan prioritas penanganan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguspriyanti, C. D., Nimita, F., & Deviana. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan di Permukiman Pesisir Kampung Tua Tanjung Riau. *Journal of Architectural Design and Development*, 01(02), 176–186. <https://doi.org/10.37253/jad.v1i2.1501>
- Damayanti, A. P. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Permukiman Di Wilayah Pesisir Kabupaten Purworejo. *REGION*, 14, 2.
- Doxiades, C. A. (1976). *Action for Human Settlements*. Athens Center of Ekistics.
- Doxiadēs, K. A. (1968). *Ekistics: An introduction to the science of human settlements*. Hutchinson & CO Ltd.
- Esariti, L., Sunarti, S., Rahdriawan, M., & Makhmudi, D. P. (2021). Kajian Strategi Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Bangka Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 5(2), 110–122. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.2.110-122>
- Fernando, R., & Arnesih, A. (2019). Perkembangan Kehidupan Ekonomi

- Masyarakat Kampung Tua Tanjung Piayu Laut Sebagai Tempat Wisata Kuliner di. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 3(2). <https://doi.org/10.33373/j-his.v3i2.1687>
- Ifan, H. Baruwadi, M., & Rahim, S. (2021). Strategi Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo. *LOSARI : Jurnal Arsitektur Kota Dan Pemukiman*, 6(2), 89–101. <https://doi.org/10.33096/losari.v6i2.299>
- Joenso, R. C., & Sari, S. R. (2020). KLASIFIKASI KEKUMUHAN DAN KONSEP PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (Studi Kasus : Permukiman Lampu Satu, Merauke). *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 4(2), 94. <https://doi.org/10.31848/arcade.v4i2.366>
- Kedeputian Bidang Pengembangan Kawasan. (2006). *Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan*.
- Lautetu, L. M., Kumurur, V. A., & Warouw, F. (2019). Karakteristik Permukiman Masyarakat Pada Kawasan Pesisir Kecamatan Bunaken. *Karakteristik Permukiman Masyarakat Pada Kawasan Pesisir Kecamatan Bunaken*, 6(1), 126–136.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2016). *PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH*.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7.
- Sakdiyah, C., & Rahmawati, D. (2020). Strategi penanganan permukiman kumuh kawasan DAS Metro Kota Malang berdasarkan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Teknik ITS*, 9(1), 223–230.